

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

* Habib Iqbal¹, Pahmi Amri²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : habib.iqbal2003@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pengawasan di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya efektivitas pengawasan, lemahnya tindak lanjut hasil evaluasi, dan belum optimalnya pengawasan terhadap program prioritas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan APBD, meliputi penetapan standar pengawasan, penilaian pelaksanaan anggaran, tindakan perbaikan, serta faktor penghambat pengawasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Badan Anggaran (Banggar), Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilakukan melalui rapat kerja, hearing, pembahasan laporan realisasi anggaran, pemanggilan OPD dan TAPD, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Namun, pengawasan masih cenderung administratif dan lebih berfokus pada serapan anggaran dibandingkan efektivitas program bagi masyarakat. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi pengawasan belum optimal karena dipengaruhi keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal daerah, kurangnya keterbukaan informasi, dan dinamika politik internal DPRD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap APBD telah berjalan, tetapi belum optimal dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota DPRD, koordinasi dengan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat agar pengawasan APBD dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Abstract

This study was motivated by the fact that oversight activities in the city of Pekanbaru continue to face various challenges, such as low oversight effectiveness, weak follow-up on evaluation results, and suboptimal oversight of regional priority programs. This study aims to analyze the Pekanbaru City DPRD's oversight of the implementation of the APBD, including the establishment of oversight standards, assessment of budget implementation, corrective actions, and factors hindering oversight. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants from the Budget Committee (Banggar), Commission II of the Pekanbaru City DPRD, and other relevant parties. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the Regional People's Representative Council (DPRD) exercises oversight through working meetings, hearings, discussions of budget implementation reports, summonses of regional government agencies (OPDs) and the Regional Budget Team (TAPD), as well as follow-up on the results of audits by the Supreme Audit Agency (BPK). However, this oversight remains largely administrative in nature and focuses more on budget absorption than on the effectiveness of programs for the community. Additionally, the follow-up on oversight recommendations has not been optimal due to constraints on resources, regional fiscal conditions, a lack of transparency, and internal political dynamics within the DPRD. This study concludes that the Pekanbaru City DPRD's oversight function regarding the Regional Budget (APBD) is operational but has not yet been optimal in achieving effective budget management oriented toward public welfare. Therefore, it is necessary to enhance the capacity of DPRD members, improve coordination with the local government, utilize information technology, and encourage public participation so that APBD oversight can be conducted in a more transparent and accountable manner.

Keywords: Oversight, Regional People's Representative Council, Regional Revenue and Expenditure Budget

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan serta penyediaan layanan publik setiap tahun. Pengelolaan APBD harus berorientasi pada kepentingan publik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai bagian dari good governance (Mardiasmo, 2005 dalam (Sari, 2016).

Keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Denisa et al., 2025).

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi instrumen penting dalam mekanisme checks and balances untuk memastikan pelaksanaan APBD sesuai peraturan, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup evaluasi substansi kebijakan, capaian program, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Pratama et al., 2025).

Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di berbagai daerah masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD, kurangnya akses data yang transparan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dinamika politik lokal. Kondisi ini menyebabkan pengawasan cenderung administratif dan belum menyentuh aspek substantif (Ismail et al., 2025).

Permasalahan tersebut juga terjadi di Kota Pekanbaru. Meskipun APBD tahun 2024 meningkat menjadi sekitar Rp2,7 triliun, realisasi belanja pada triwulan I masih rendah ($\pm 18\%$), terdapat temuan BPK terkait ketidaksesuaian belanja, serta beberapa program prioritas belum terealisasi optimal. Selain itu, keterlibatan DPRD dalam monitoring langsung dinilai belum maksimal dan akses informasi publik terkait realisasi APBD masih terbatas.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD masih perlu ditingkatkan. Jika tidak dibenahi, kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas DPRD, peningkatan transparansi data, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat agar pengawasan APBD dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Azri, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru dalam implementasi APBD dengan fokus pada mekanisme pengawasan yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta strategi peningkatan efektivitas pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta menjadi referensi bagi DPRD Kota Pekanbaru dalam mewujudkan pengawasan yang lebih akuntabel dan responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara komprehensif mekanisme dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan APBD. Pendekatan ini bertujuan mengungkap realitas empiris di lapangan mengenai peran DPRD dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi.

Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna dan pengalaman para informan yang terlibat dalam proses pengawasan, khususnya anggota DPRD dan pemangku kepentingan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif guna menggambarkan dinamika pelaksanaan pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya dalam mendukung pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan efisien.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme dan kendala pengawasan APBD, observasi terhadap kegiatan DPRD seperti rapat kerja dan sidang paripurna guna mendapatkan bukti empiris pelaksanaan pengawasan, serta studi dokumentasi melalui analisis peraturan daerah, laporan realisasi anggaran, notulen rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan APBD telah dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu penetapan standar, penilaian pelaksanaan, dan tindakan perbaikan. Pengawasan dilakukan berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah, data realisasi anggaran, serta hasil wawancara dengan Badan Anggaran dan Komisi II DPRD.

1. Penetapan Standar Pengawasan

DPRD Kota Pekanbaru menetapkan standar pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan anggaran daerah. Standar utama yang digunakan adalah tingkat serapan anggaran, capaian program, serta evaluasi kinerja OPD melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Badan Anggaran menilai efektivitas pelaksanaan APBD melalui evaluasi berkala terhadap laporan realisasi anggaran, sedangkan Komisi II memfokuskan pengawasan pada sektor pendapatan daerah, khususnya PAD, dana transfer, serta kondisi fiskal daerah yang mengalami defisit dan tunda bayar. Meskipun standar telah tersedia, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program.

2. Penilaian Pelaksanaan APBD

Tahap penilaian dilakukan melalui rapat kerja, evaluasi laporan realisasi anggaran, serta pemanggilan TAPD dan OPD untuk mencocokkan laporan dengan kondisi lapangan. DPRD menggunakan data realisasi APBD sebagai dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun, penilaian masih cenderung berfokus pada aspek kuantitatif, terutama persentase serapan anggaran, sementara aspek kualitatif seperti kualitas program, efisiensi anggaran, dan dampak terhadap masyarakat belum menjadi perhatian utama. Selain itu, proses evaluasi belum selalu tepat waktu karena keterbatasan kesiapan pihak eksekutif.

3. Tindakan Perbaikan

DPRD melakukan tindakan perbaikan melalui pemberian rekomendasi, pemanggilan OPD, evaluasi program, serta tindak lanjut terhadap temuan audit BPK. DPRD juga menggunakan indikator SiLPA sebagai dasar perbaikan perencanaan anggaran dan mendorong peningkatan kinerja OPD. Komisi II bahkan dapat merekomendasikan penanganan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Meskipun demikian, tindak lanjut pengawasan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan data, tingginya SiLPA, dan belum optimalnya realisasi beberapa program.

Secara umum, DPRD Kota Pekanbaru telah melaksanakan fungsi pengawasan APBD sesuai tahapan teori pengawasan, namun efektivitasnya belum optimal. Pengawasan masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek penilaian kualitatif, ketepatan waktu evaluasi, ketersediaan data yang komprehensif, serta koordinasi antara DPRD dan

pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pada tahap penilaian pelaksanaan, DPRD melakukan evaluasi dengan membandingkan rencana dan realisasi APBD serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program. Namun, proses penilaian masih lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan kuantitatif, terutama tingkat serapan anggaran, sehingga aspek kualitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak terhadap masyarakat belum menjadi fokus utama. Evaluasi juga belum selalu dilakukan secara tepat waktu karena keterbatasan kesiapan data dan koordinasi dengan pihak eksekutif.

Pada tahap tindakan perbaikan, DPRD memberikan rekomendasi, melakukan pemanggilan OPD, mengevaluasi program, serta menindaklanjuti temuan audit. DPRD juga memanfaatkan indikator SiLPA sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan anggaran. Namun, tindak lanjut rekomendasi pengawasan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya keterbukaan informasi, kondisi fiskal daerah yang belum stabil, tingginya SiLPA, serta dinamika politik internal DPRD.

Secara keseluruhan, fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru telah berjalan secara prosedural, tetapi belum optimal dalam mendorong pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi untuk keterbukaan data, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengawasan APBD dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan APBD, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan secara normatif telah berjalan melalui mekanisme formal seperti rapat kerja dengan OPD, pembahasan laporan realisasi anggaran, pembahasan LKPJ kepala daerah, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK. Namun, secara substantif efektivitas pengawasan masih belum optimal.

Pada aspek penetapan standar, DPRD belum memiliki indikator kinerja pengawasan yang terukur dan konsisten, sehingga pengawasan masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada capaian program serta dampak pembangunan. Pada aspek penilaian, meskipun DPRD menerima berbagai laporan dari pemerintah daerah, proses evaluasi masih cenderung prosedural dan belum didukung analisis mendalam terkait efektivitas program, ketepatan sasaran belanja, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek tindakan perbaikan, DPRD telah memberikan rekomendasi atas temuan audit dan pelaksanaan anggaran, tetapi tindak lanjutnya masih lemah, terlihat dari berulangnya masalah penyerapan anggaran, temuan administrasi keuangan, serta belum optimalnya realisasi program prioritas. Kendala utama pengawasan meliputi keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam menganalisis anggaran, terbatasnya akses data keuangan yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal, serta pengaruh dinamika politik terhadap objektivitas pengawasan.

Secara keseluruhan, prinsip good governance dalam pengawasan APBD belum sepenuhnya terwujud, terutama pada aspek transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas tindak lanjut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengawasan DPRD dapat menjadi instrumen kontrol publik yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azri, M. V. (2022). *Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Reklame*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Denisa, N., Aditia, D., Nasution, D., Pembangunan, U., & Budi, P. (2025). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(2), 127–134.
- Ismail, A., W, D. P., & Fatah, Z. (2025). Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pematang Jaya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(3).
- Pratama, H. E., Putri Amelia, R., Fitriyah, DSP, P., Baetoni, M. A., & Poernomo, R. W. (2025). Relevansi Peran Strategis DPRD terhadap Prinsip Good Governance dalam Struktur Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16295–16300.
- Sari, P. (2016). Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 847–854.